



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

a. Sejarah singkat Kota Malang.

Kota Malang, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang¹. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan kota pelajar.

¹ <http://www.malangkota.go.id/halaman/16060714> di akses 13 Maret 2014

Wilayah cekungan Malang telah ada sejak masa purbakala menjadi kawasan pemukiman. Banyaknya sungai yang mengalir di sekitar tempat ini membuatnya cocok sebagai kawasan pemukiman. Wilayah Dinoyo dan Tlogomas diketahui merupakan kawasan pemukiman prasejarah. Selanjutnya, berbagai prasasti (misalnya Prasasti Dinoyo), bangunan percandian dan arca-arca, bekas-bekas pondasi batu bata, bekas saluran drainase, serta berbagai gerabah ditemukan dari periode akhir Kerajaan Kanjuruhan (abad ke-8 dan ke-9) juga ditemukan di tempat yang berdekatan².

Nama "*Malang*" sampai saat ini masih diteliti asal-usulnya oleh para ahli sejarah. Para ahli sejarah masih terus menggali sumber-sumber untuk memperoleh jawaban yang tepat atas asal-usul nama "*Malang*". Sampai saat ini telah diperoleh beberapa hipotesa mengenai asal-usul nama Malang tersebut. *Malangkucecwara* yang tertulis di dalam lambang kota itu, menurut salah satu hipotesa merupakan nama sebuah bangunan suci. Nama bangunan suci itu sendiri diketemukan dalam dua prasasti Raja Balitung dari Jawa Tengah yakni prasasti Mantyasih tahun 907, dan prasasti 908 yakni diketemukan di satu tempat antara Surabaya-Malang³.

Namun demikian dimana letak sesungguhnya bangunan suci *Malangkucecwara* itu, para ahli sejarah masih belum memperoleh kesepakatan. Satu pihak menduga letak bangunan suci itu adalah di daerah gunung Buring, satu pegunungan yang membujur di sebelah timur kota Malang dimana terdapat salah satu puncak gunung yang bernama Malang. Pembuktian atas kebenaran dugaan ini masih terus dilakukan karena ternyata, disebelah barat kota Malang juga

² http://www.arek_ngalam.blogspot.com/ di akses 13 Maret 2014

³ http://www.arek_ngalam.blogspot.com/ di akses 13 Maret 2014

terdapat sebuah gunung yang bernama *Malang*. Pihak yang lain menduga bahwa letak sesungguhnya dari bangunan suci itu terdapat di daerah Tumpang, satu tempat di sebelah utara kota Malang. Sampai saat ini di daerah tersebut masih terdapat sebuah desa yang bernama *Malangsuka*, yang oleh sebagian ahli sejarah, diduga berasal dari kata *Malankuca* yang diucapkan terbalik. Pendapat di atas juga dikuatkan oleh banyaknya bangunan-bangunan purbakala yang berserakan di daerah tersebut, seperti Candi Jago dan Candi Kidal, yang keduanya merupakan peninggalan zaman Kerajaan Singasari. Dari kedua hipotesa tersebut di atas masih juga belum dapat dipastikan manakah kiranya yang terdahulu dikenal dengan nama Malang yang berasal dari nama bangunan suci *Malangkucecwara* itu⁴.

Apakah daerah di sekitar Malang sekarang, ataukah kedua gunung yang bernama Malang di sekitar daerah itu. Sebuah prasasti tembaga yang ditemukan akhir tahun 1974 di perkebunan Bantaran, Wlingi, sebelah barat daya Malang, dalam satu bagiannya tertulis sebagai berikut :

*“taning sakrid Malang-akalihan wacid lawan macu pasabhanira dyah
Limpa Makanagran i”*

*“di sebelah timur tempat berburu sekitar Malang bersama wacid dan
mancu, persawahan Dyah Limpa”*

Dari bunyi prasasti itu ternyata Malang merupakan satu tempat di sebelah timur dari tempat-tempat yang tersebut dalam prasasti itu. Dari prasasti inilah diperoleh satu bukti bahwa pemakaian nama Malang telah ada paling tidak sejak abad 12 Masehi. Hipotesa-hipotesa terdahulu, barangkali berbeda dengan satu pendapat

⁴ http://www.arek_ngalam.blogspot.com/ di akses 13 Maret 2014

yang menduga bahwa nama Malang berasal dari kata “*Membantah*” atau “*Menghalang-halangi*” (dalam bahasa Jawa berarti Malang).

Alkisah Sunan Mataram yang ingin meluaskan pengaruhnya ke Jawa Timur telah mencoba untuk menduduki daerah Malang. Penduduk daerah itu melakukan perlawanan perang yang hebat. Karena itu Sunan Mataram menganggap bahwa rakyat daerah itu menghalang-halangi, membantah atau malang atas maksud Sunan Mataram. Sejak itu pula daerah tersebut bernama Malang. Timbulnya Kerajaan Kanjuruhan tersebut, oleh para ahli sejarah dipandang sebagai tonggak awal pertumbuhan pusat pemerintahan yang sampai saat ini, setelah 12 abad berselang, telah berkembang menjadi Kota Malang. Setelah kerajaan Kanjuruhan, di masa emas kerajaan Singasari (1000 tahun setelah Masehi) di daerah Malang masih ditemukan satu kerajaan yang makmur, banyak penduduknya serta tanah-tanah pertanian yang amat subur. Ketika Islam menaklukkan Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1400, Patih Majapahit melarikan diri ke daerah Malang. Ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan Hindu yang merdeka, yang oleh putranya diperjuangkan menjadi satu kerajaan yang maju. Pusat kerajaan yang terletak di kota Malang sampai saat ini masih terlihat sisa-sisa bangunan bentengnya yang kokoh bernama Kutobedah di desa Kutobedah. Adalah Sultan Mataram dari Jawa Tengah yang akhirnya datang menaklukkan daerah ini pada tahun 1614 setelah mendapat perlawanan yang tangguh dari penduduk daerah ini⁵.

Seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia pada umumnya, Kota Malang modern tumbuh dan berkembang setelah hadirnya administrasi

⁵ <http://www.malangkota.go.id/> di akses 13 Maret 2014

kolonial Hindia Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif masih berbekas hingga sekarang, misalnya "*Ijen Boulevard*"⁶ dan kawasan sekitarnya. Pada mulanya hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang menjadi monumen hidup dan seringkali dikunjungi oleh keturunan keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana.

Pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda, daerah Malang dijadikan wilayah "*Gemente*" (Kota). Sebelum tahun 1964, dalam lambang kota Malang terdapat tulisan ; "*Malang namaku, maju tujuanku*" terjemahan dari "*Malang nominor, sursum moveor*". Ketika kota ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-50 pada tanggal 1 April 1964, kalimat-kalimat tersebut berubah menjadi : "*Malangkucecwara*". Semboyan baru ini diusulkan oleh almarhum Prof. Dr. R. Ng. Poerbatjaraka, karena kata tersebut sangat erat hubungannya dengan asal-usul kota Malang yang pada masa Ken Arok kira-kira 7 abad yang lampau telah menjadi nama dari tempat di sekitar atau dekat candi yang bernama Malangkucecwara.

Kota Malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda, terutama ketika mulai di operasikannya jalur kereta api pada tahun 1879. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan

⁶ http://www.arek_ngalam.blogspot.com/ di akses 13 Maret 2014

fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

b. Lokasi penelitian

Lokasi yang diteliti oleh peneliti yaitu di kota Malang yang mana secara geografis Kota Malang terletak pada koordinat $112^{\circ} 06'$ - $112^{\circ} 07'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}06'$ - $8^{\circ}02'$ Lintang Selatan. Kota Malang dikelilingi oleh gunung-gunung yaitu Gunung Arjuno di sebelah utara, Gunung Semeru di sebelah Timur, gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat serta Gunung Kelud di sebelah Selatan.

Wilayah Kota Malang merupakan daerah perbukitan dan dataran tinggi serta dilewati oleh sungai baik sungai besar maupun sungai kecil.

1. Kondisi Wilayah Penelitian

Secara administrative Kota Malang merupakan wilayah di Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan dan 57 desa. Mencakup luas wilayah 110,06 km² dengan perincian sebagai berikut:

- a) Kecamatan Klojen dengan luas 8,83 km², terbagi menjadi 89 RW dan 674 RT
- b) Kecamatan Kedungkandang dengan luas 39,89 km², terbagi menjadi 110 RW dan 822 RT.
- c) Kecamatan Blimbing dengan luas 17,77 km², terbagi menjadi 123 RW dan 880 RT.
- d) Kecamatan Sukun dengan luas 20,97 km²; terbagi menjadi 86 RW dan 820 RT; dan

- e) Kecamatan Lowokwaru dengan luas 22,60 km² terbagi menjadi 118 RW dan 739 RT.

Tabel 1.1
DAFTAR KECAMATAN KOTA MALANG⁷

KECAMATAN				
Klojen	Kedungkandang	Blimbing	Sukun	Lowokwaru
Kauman	Madyopuro	Arjosari	Mulyorejo	Tunjungsekar
Kasin	Cemorokandang	Purwodadi	Pisangcandi	Tulusrejo
Bareng	Wonokoyo	Blimbing	Tanjungrejo	Ketawanggede
Samaan	Bumiayu	Purwantoro	Bakalankrajan	Tasikmadu
Rampal Celaket	Tlogowaru	Bunulrejo	Karangbesuki	Tlogomas
Kidul Dalem	Kedungkandang	Kesatrian	Sukun	Merjosari
Penanggungan	Lesanpuro	Polehan	Ciptomulyo	Dinoyo
Gading Kasri	Sawojajar	Jodipan	Kebonsari	Mojolangu
Klojen	Buring	Balearjosari	Gadang	Jatimulyo
Sukoharjo	Mergosono	Polowijen	Bandungrejosari	Tulungwulung
Oro-oro Dowo	Arjowinangun	Pandanwangi	Bandulan	Sumbersari
	Kotagama			Lowokwaru

2. Kondisi Masyarakat Penelitian

a) Jumlah penduduk

Kota Malang dengan jumlah penduduk 804.570 jiwa, sebagaimana data dalam tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Malang⁸

Jumlah laki-laki	291.897 jiwa
Jumlah perempuan	512.673 jiwa
Jumlah total	804.570 jiwa

⁷ <http://www.malangkota.go.id/halaman/16060714> di akses 13 Maret 2014

⁸ <http://www.malangkota.go.id/halaman/16060783> di akses 13 Maret 2014

Jumlah kepala keluarga	1238 KK
------------------------	---------

b) Etnis

Hampir semua etnis masyarakat Kota Malang adalah Jawa dan Madura, selebihnya hanyalah pendatang. Sehingga bahasa keseharian yang digunakan adalah bahasa Jawa.

c) Agama atau aliran kepercayaan

Agama yang dianut oleh penduduk kota Malang antara lain Islam, Katolik, Kristen. Komposisi penduduk kota Malang menurut agama pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : agama Islam. 5200 jiwa, Katolik 46 jiwa, 49 Kristen jiwa.

Tabel 1.3**Keagamaan Dan Kepercayaan Masyarakat Kota Malang⁹**

NO	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	2.300	2.899
2.	Kristen	24	26
3.	Katholik	19	27
Jumlah		2343	2952

Sarana ibadah umat beragama di kota Malang terdiri dari masjid sekitar 604 buah, langgar/mushola sekitar 2304 buah.

Tabel 1.4**Sarana Pribadatan Masyarakat Kota Malang¹⁰**

NO	Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
1.	Jumlah Masjid	604
2.	Jumlah Langgar/Surau/Mushola	2304

⁹ <http://ngalam.web.id/read/776/daftar-kecamatan-di-kabupaten-malang/> di akses 13 Marer 2014

¹⁰ <http://ngalam.web.id/read/776/daftar-kecamatan-di-kabupaten-malang/> di akses 13 Maret 2014

jumlah	8208
--------	------

Melihat dari segi keagamaan masyarakat Kota Malang, mayoritas berpegang teguh pada agama Islam. Masyarakat tak jarang mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin berupa pengajian muslimin dan muslimat, tahlil, dan sebagainya.

d) Pendidikan

Kota Malang adalah kota pendidikan, terdapat berbagai macam perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, sekolah, serta pondok pesantren.

Kota Malang juga bisa menjadi pacuan dalam mempertimbangkan berbagai permasalahan keagamaan, sebagaimana data pondok pesantren yang terdapat di kota malang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Daftar Pondok Pesantren di Kota Malang¹¹

NO	NAMA PONPES	PENGASUH	ALAMAT	SISWA	SISWI	JUMLAH	NO.TLP
KEDUNGKANDANG							
1	Al-Hayatul Islamiah	Drs Irfan Aziz	Jl. Timur Sungai 1	122	124	246	716440
2	Darus Salam	KH. Racmad Suwandi	Jl. Puter 30 AW	100	40	140	751029
3	Sunan Muria	Much. Syaiful Bahri	Jl. KH. Hasyim V Rt 7	765	490	1.255	717327
4	Nurul Huda	KH. Masduki Mahfud	Jl. Kol Sugiono	66	98	184	369187
5	Sabilillah	Yusuf Maron	Jl. Muharto V	91	121	212	
KLOJEN							

¹¹ <http://www.malangkota.go.id/halaman/16060714> di akses 13 Maret 2014

1	Miftahul Huda	KH. Baidhowi Muslich	Jl.	Gading Pesantren 38	575	135	710	582174
2	Al - Islam	Drs. Musta'in	Jl.	Prof. Yamin IV/20	56	-	56	341230
3	Yassalam	Drs. M. Toha Rosyadi	Jl.	Jagung Suprpto I/20	22	15	37	320620
4	Darul Hadist	A. Dimiyati Adzim	Jl.	Aris Munandar 8-a-8	172	55	227	362679
5	Sabilul Hidayah	-	Jl.	T. Pelabuhan Ratu	-			478460
BLIMBING								
1	Baiturohmah	M. Sholeh Udin	Jl.	Raya Ciliwung 61	2.950	2.375	5.325	491482
2	Himatul Muridhin	KH. Baidhowi	Jl.	Bauksit 27	20	30	50	-
3	Al Ma'rifat	Syeh Pawit Waluyo	Jl.	Sumpil I/66	21	7	28	482670
4	Itthadul Mubhaliqien	Drs Affandi A. Mukti	Jl.	Simp. Tlk Bayur	98	72	170	478649
LOWOKWARU								
1	Darut Tauhid	KH. Abdullah Abdun	Jl.	Sunan Ampel III/10	346	-	346	552697
2	Hidayatul Mubtadien	Gus Moch Toha	Jl.	K Yusuf 74-A Ts Madu	136	65	201	471290
3	Nailul Falah	KH. Nur Cholis	Jl.	Ikan Tombro	191	290	481	490974
4	Darul Ulum Al Fadholi	KH. M Rofi'i Mahfud	Jl.	Joyomulyo	271	249	520	582488
5	Al Hikam	KH. Hasyim Muzadi	Jl.	Cengger Ayam	270	200	470	475387
6	Surya Buana	Drs. Abd. Djalil MA g	Jl.	Gajayana IV/1	65	54	119	553809
7	Al Mubarak	M Yasin	Jl.	Joyomulyo	103	120	223	570782
8	Nurussalam	Drs. Abd Madjid Ridwan	Jl.	Kalpataru	40	50	90	481288
9	Ainul yaqien	Drs Thinah Hasan	Jl.	Tatasurya				
10	Luhur	Prof. Dr KH Mudori	Jl.	Sumber Sari	120	80	200	567820
11	Mahasiswa Al Firdaus	Drs. Abd Halim	Jl.	Mertojoyo SLT.B/10	9	21	30	572212

		Mag						
SUKUN								
1	Nurul Ulum	M Fauzi sifa	Jl.	Satsuit Tubun 17	95	450	545	801095
2	Awwaliyah	Drs Muniron	Jl.	Kol Sugiono	45	60	105	
3	Anwarul Huda	KH. Baidhowi Muslich	Jl.	Raya Candi	109	78	187	566037

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kota Malang adalah sebagai pendatang dan pengarus pendidikan moral keagamaan baik lewat sekolah formal maupun pondok pesantren sangatlah berpengaruh dalam proses dan berkembangnya nalar pemikiran terhadap permasalahan keagamaan, sehingga dari sinilah peneliti berangkat untuk mengambil kota Malang sebagai objek penelitian dalam permasalahan unifikasi kalender hijriyah atau pembentukan kalender Islam terpadu di Indonesia.

B. Paparan Data

Dalam paparan dan analisis data ini, yang mencangkup pendapat para tokoh dan ulama kota malang mengenai usaha pembentukan kalender hijriyah terpadu/unifikasi kalender hijriyah, akan mengungkapkan pendapat para tokoh, kyai, dan ulama di antaranya :

Responden**Profil Responden****KH.Drs.Chamzawi, M.HI**

Beliau adalah Dosen sekaligus Dewa Kyai di MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Menjabat Dewan Syariah NU Cabang Kota Malang, Lahir di Rembag, 08 Agustus 1951, menempuh pendidikan awal di Sekolah Rakyat Negri kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri beserta Madrasah Bidayatul Kediri, selama 9 tahun menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus menempa Ilmu di Pondok Pesantren Darul Hadis, kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Islam Malang (UNISMA)

Drs. Abdullah Zainur**Rouf, Mhi**

Beliau adalah Dosen Pendidikan Bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, lahir di Tuban, 09 Mei 1969 menempuh pendidikan di Pondok Pesantren As Shomadiyah di Tuban, dan melanjutkan studi di Pondok Pesantren Nurul Huda, Mergosono, Malang. Pendidikan formal beliau di jenjang strata I di raih di IAIN

Malang, dalam Jurusan Bahasa Arab kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Islam Malang (UNISMA)

Drs. Athoillah Wijayanto, S.Ag Ust. Athoillah adalah seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang Lahir di Malang, 30 Maret 1971.

Seorang putra daerah yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Bahsul Masail NU Kota Malang, tinggal di Jl.Bandulan Raya 2/949 beliau adalah lulusan dari IAIN Tarbiyyah Malang, dengan predikan S1 pada program Pendidikan Bahasa Arab

Dr. Abdul Haris. MA Beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bidang Tarjih waa Tajdid Muhammadiyah, lahir di Bojonegoro, 17 April 1967 pendidikan formal pertama beliau di tempuh di Madrasah Ibtidaiyyah At Tanwir, Bojonegoro sampai lulus Madrasah Aliyah, kemudian melanjutkan studi di IAIN Sunan Ampel, mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Arab beliau mendapatkan kesempatan kuliah di Sudan, dengan program yang sama, dan

kembali ke Indonesia untuk melanjutkan S3 di Universitas yang sama pula.

Drs. Samsul Rizal, MA

Lahir di Sumatra Selatan, 12 Desember 1956, Beliau menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah masa bakti 2009-2013, menempuh pendidikan di Pondok Modern Gontor, dan melanjutkan studi di IAIN Sunan Ampel Malang pada program Pendidikan Agama Islam, beliau mendapat kesempatan untuk memperdalam ilmu di Pakistan pada jenjang S2 di S2 Internasional Islamic university of Pakistan.

Dr. H. Nur Hakim, M.Ag

Beliau juga merupakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, di bidang Tarjih waa Tajdid, Beliau lulusan dari universitas malaysia di University of Malaya, Kuala Lumpur, sedangkan gelar SI dan SII di tempuh di Indonesia, Lahir di Bojonegoro dan tumbuh di daerah kelahirannya, menempuh pendidikan formal MIN, MTsN, dan MAN Bojonegoro.

1. Munculnya Usaha tentang Unifikasi Kalender Hijriyah di Indonesia Khususnya di Kota Malang Menurut Pandangan NU dan Muhammadiyah
a. Usaha Pemerintah dalam Mewujudkan Unifikasi Kalender Hijriyah di Indonesia, menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Mengingat sering terjadinya perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan/kalender Islam maka Kementerian Agama sejak tahun 2007 mengusahakan dalam mewujudkan sebuah kalender Islam terpadu/Unifikasi Kalender Hijriyah di Indonesia.

Bermula dari gagasan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla pada tahun 2007, dalam hal ini, diwakili oleh Ditjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI pernah membentuk tim kecil yang terdiri dari Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, MSc (pakar Astronomi), Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag (pakar wakil dari ormas Muhammadiyah), Ahmad Izzudin (pakar wakil dari ormas Nahdlatul Ulama) dan Drs. H. Muhyiddin, M.Si (pakar wakil dari Pemerintah)¹².

1) Usaha Pemerintah dalam Mewujudkan Unifikasi Kalender Hijriyah di Indonesia, menurut Tokoh Nahdlatul Ulama

Organisasi Nahdlatul Ulama sangatlah mendukung tentang usaha pemerintah dalam hal pembuatan kalender Islam terpadu/unifikasi kalender Hijriyah, sebagaimana di ungkapkan oleh Ust. Athoillah Wijayanto, S.Ag selaku Ketua Lejnah Bahsul Masail Nadlatul Ulama kota Malang :

¹² http://www.NU.Online/Rubrik_Nasional/NU_Muhamadiyah_Bertemu_Samakan_Penentuan_Idul_Fitri/ di akses 23 Maret 2014

“.....iya.....itu berarti pemerintah mempunyai respon terhadap perbedaan yang terjadi di Indonesia, jangankan pemerintah, dari NU pun juga sering mengadakan kajian dan pelatihan-pelatihan dengan tujuan pendalaman dan pemahaman tentang falak, oleh karena itu perbedaan yang terjadi bisa disikapi dengan bijak, begitu juga sebaliknya.....”¹³

Hal serupa juga diungkapkan oleh KH.Drs.Chamzawi, M.HI, selaku ketua syuriah Nadlatul Ulama kota Malang, yang menyatakan bahwa pemerintah adalah faktor terpenting dalam mewujudkan kalender Islam terpadu/unifikasi kalender Hijriyah di Indonesia karena Keputusan hakim atau pemerintah dalam ijtihad dapat menghilangkan persengketaan sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“.....seharusnya pemerintah sudah mempunyai metode yang baku untuk digunakan dalam penyusunan kalender tersebut, mengenai perbedaan yang ada itu sudah pasti, karena setiap orang memiliki pendapat masing-masing, akan tetapi ada sebuah kaidah fiqh yang berbunyi hukmul hakim yarfa'u khilaf tetap pemerintah yang memegang keputusan.....”¹⁴

Drs. Abdullah Zainur Rouf, Mhi juga menambahkan bahwa usaha pemerintah dalam hal ini adalah kementerian agama sangatlah diperlukan, karena perbedaan penetapan awal bulan atau pembuatan kalender Islam yang terpadu dan ter-unifikasi sangat memerlukan keputusan dari pemerintah :

“.....untuk menyatukan sebuah pendapat harus ada yang menjadi mediator atau penengah, yang mampu menengahi dalam permasalahan ini, maka pemerintah Indonesialah yang bisa

¹³ Ust. Athoillah Wawancara dengan tokoh NU pada tanggal 24 Maret 2014

¹⁴ Kh.Drs.Chamzawi, Wawancara dengan tokoh NU pada tanggal 14 Maret 2014

menjadi penengah diantara berbagai perbedaan yang terjadi di Indonesia.....”¹⁵

2) Usaha Pemerintah dalam Mewujudkan Unifikasi Kalender Hijriyah di Indonesia, menurut Tokoh Muhammadiyah

Dr. Abdul Haris. MA selaku Wakil Ketua PDM, Bidang Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah kota Malang mengungkapkan bahwa permasalahan perbedaan dalam penetapan awal bulan dan kalender Islam adalah masalah *ijtihad* saja, sehingga terkadang umat Islam yang belum paham dan terlalu mengerti tentang permasalahan ini menjadi bingung, maka usaha pemerintah dalam hal pembentukan kalender Islam yang terpadu dan terunifikasi perlu di dukung dan di usahakan :

“.....kita hanya perlu ketegasan pemerintah dalam permasalahan ini, tentang usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saya juga sangat mendukung itu dan berharap cepat terwujudnya sebuah kalender Islam yang terpadu untuk Indonesia, mengingat ini semua untuk kemaslahatan umat Islam bersama.....”¹⁶

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Drs. Samsul Rizal, MA, bahwa apapun keputusan pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah kementerian agama, selagi itu adalah kesepakatan bersama dan mendatangkan masalah bagi umat Islam di Indonesia kita wajib mendukung itu :

“.....setiap pemerintahan pasti memiliki wilayah untuk memerintah, dan warga yang diperintah, sehingga wilayah hukum bagi pemerintah Indonesia adalah seluruh bangsa Indonesia baik itu Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah, sehingga apapun keputusan pemerintah dalam penetapan kalender Islam ya.....kita

¹⁵ Zainur, Wawancara dengan tokoh NU pada tanggal 21 Maret 2014

¹⁶ Abdul Haris, Wawancara dengan tokoh Muhammadiyah pada tanggal 18 Maret 2014

harus taat dan patuh, selagi itu tidak bertentangan dengan ajaran Agama dan mendatangkan masalah untuk semua.....”¹⁷

b. Faktor yang Melatar Belakangi Perbedaan Pandanga dalam Penetapan Awal Bulan/kalender Islam antara NU dan Muhammadiyah, menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Penggunaan hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan kamariah, adalah salah satu faktor yang melatar belakangi perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Hingga kini perdebatan hisab-rukya tak kunjung selesai masing-masing pihak merasa lebih sesuai dengan pesan *nash*.

Di Indonesia perbedaan ini sangat nampak antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Bagi NU kedudukan hisab hanya sebagai pembantu dalam pelaksanaan rukyatul hilal di lapangan. Oleh karena itu, meski sudah melakukan prediksi, mereka tidak berani memastikan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dengan hisab, tetapi tetap menunggu hasil observasi di lapangan. Seperti telah diketahui NU mengulang-ulang hadis Nabi saw *sumu li ru'yatihi* sebagai landasan utama.

Mereka mengakui bahwa kata hilal (*newmoon*) yang terdapat dalam Q.S. *al-Baqarah* ayat 189 bersifat general. Akan tetapi kaitannya dengan awal Ramadan dan Syawal, hadis-hadis rukyat dianggap paling tegas dan jelas sebagai landasan beristimbat¹⁸.

¹⁷ Samsul Rizal, Wawancara dengan tokoh Muhammadiyah pada tanggal 18 Maret 2014

¹⁸ Makalah Seminar Falakiyyah PB NU. *Pedoman Hisab dan Rukyat*, (Jakarta : Lajnah Falakiyah PB NU, 1994)

1) Faktor yang Melatar Belakangi Perbedaan Pandangan dalam Penetapan Awal Bulan/kalender Islam menurut Tokoh Nahdlatul Ulama.

KH.Drs.Chamzawi, M.HI mengungkapkan bahwa perbedaan yang terjadi antara NU dan Muhammadiyah hanya sebatas pemahaman dalam penggunaan metode hisab dan rukyah :

“.....Perbedaan antara NU dan Muhammadiyah hanya sebatas penggunaan metode hisab dan rukyah saja, kalau NU menganggap metode hisab hanya sebatas untuk membantu dalam pelaksanaan rukyah hilal di lapangan, kalau Muhammadiyah beranggapan bahwa metode hisab adalah metode yang bisa dipertanggung jawabkan secara logika dan hasilnya pun bisa mendekati kebenaran.....”¹⁹

Senada dengan Kh.Drs.Chamzawi, ketua Lajnah bahsul masail NU kota Malang, ust. Athoillah Wijayanto, S.Ag menambahkan sebuah kutipan hadis :

“.....Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal, jika memang hilal tidak terlihat kan di suruh menyempurnakan 30 hari syakban, perintah ini kan sudah jelas mas....bahwa keberadaan hilal lah yang menjadi dasar dalam menentukan awal bulan, walaupun dengan metode hisab bisa, akan tetapi alangkah lebih baiknya kita kembali ke nash yang asli kan.....”²⁰

Sementara itu, KH.Drs.Chamzawi, M.HI menambahkan bahwa NU sudah membahas permasalahan ini pada muktammar ke-20 di Surabaya, pada tahun 1954 dengan kesimpulan bahwa tidak boleh mengumumkan hari raya sebelum ditetapkan dari pemerintah Indonesia, mengingat polemik

¹⁹ Kh.Drs.Chamzawi, Wawancara dengan tokoh NU pada tanggal 14 Maret 2014

²⁰ Ust. Athoillah, Wawancara dengan tokoh NU pada tanggal 24 Maret 2014

dan guncangan yang terjadi di masyarakat dan umat muslim di Indonesia, dan mengharapkan bahwa pemerintah bersikap tegas dan melarangnya.

2) Faktor yang Melatar Belakangi Perbedaan Pandangan dalam Penetapan Awal Bulan/kalender Islam menurut Tokoh Muhammadiyah.

Dr. Abdul Haris. MA, menanggapi pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama kota Malang menyatakan bahwa tidak hanya *rukyyatul hilal* saja yang dapat di jadikan pedoman dalam memulai awal bulan, khususnya awal bulan *syawwal*, *romadhon*, dan *dzulhijjah*. Di karenakan ada 4 hal yang dapat menentukan awal bulan *romadhon* yaitu 1). Rukyyatul Hilal 2). Mendengarkan kesaksian orang yang adil 3). Istikmal 4). Hisab. :

“.....dalam Kitab Syiyyam terdapat pembahasa dengan bab Kaiyyiyatu as Syiyyam, yang menyatakan bahwa ada 4 cara dalam menentukan awal dan ahir dari bulan puasa yaitu : 1). Rukyyatul Hilal 2). Mendengarkan kesaksian orang yang adil 3). Istikmal 4). Hisab.....”²¹

Senada dengan pendapat ketua PDM kota Malang, bidang Tarjih, Dr. H. Nur Hakim, M.Ag dan Drs. Syamsul Rizal Yazid, MA menambahkan dengan mengutip pendapat Asjumi Abdurrahman bahwa penggunaan metode hisab sudah pernah di gunakan oleh para tabi'in dan ulama salaf, bahkan banyak sekali refrensi yang menceritakan pentingnya methode hisab dalam menentukan awal serta ahir dari suatu bulan dalam kalender hijriyah²² :

“.....kalau memang hilal tidak terlihat di awal ramadhan, kita boleh mas.....memakai hisab, hal ini juga pernah

²¹ Abdul Haris Wawancara dengan tokoh Muhammadiyah pada tanggal 18 Maret 2014

²² Syamsul Rizal Wawancara dengan tokoh Muhammadiyah pada tanggal 18 Maret 2014

dilakukan oleh para ulama salaf dan para tabi'in, ketika hilal tertutup oleh mendung dan melakukan hisab sedang orang yang mempercayainya wajib hukumnya untuk berpuasa.....”

“.....kalau gak salah ulama seperti Ibn Qutaibah juga melakukan hisab, dalam menentukan awal dan ahir dari bulan ramadhan, trus muhammad rasyid ridha seorang ulama konteporer juga sama lebih condong dalam penggunaan hisab, dan itu semua tidak menyampingkan atau menghilangkan adanya methode rukyahtul hilal.....”

2. pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang tentang usaha pembuatan Unifikasi kalender hijriyah di Indonesia

Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berharap agar hisab dan rukyah terus diintegrasikan dengan melihat dan memperhatikan kemashlahatan secara objectif. Dalam Munas tarjih ke 26 di Padang, Sumatra Barat memutuskan untuk mengkaji persoalan penentuan awal bulan kamariyah secara terus menerus demi mencari titik temu dalam membangun kalender Hijriyah Nasional²³

a. Masukan dan usulan Tokoh Nahdlatul Ulama mengenai usaha dari kementerian agama dalam pembentukan sebuah Unifikasi Kalender Hijriyah.

Ketua syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama kota Malag KH.Drs.Chamzawi, M.HI, mengungkapkan bahwa alangkah baiknya pemerintah memadukan dua methode yang digunakan antara NU dan Muhammadiyah yaitu methode hisab dan rukyah, menjadi sebuah methode baru yang lebih memuaskan dan diterima oleh masing-masing pihak, beliau juga mengutip sebuah kaidah “*al-mukhafadhoh ‘ala qodim as sholih waal akhdu bil jadidil as lakh*” :

²³ Abd. Salam Nawawi, *Rukyah Hisab di kalangan NU dan Muhammadiyah*, (Surabaya, diantama: 2004); h 43

“.....pemerintah harus berani memutuskan sebuah metode lain yang memadukan antara hisab dan rukyah, dengan melibatkan NU, Muhammadiyah, dan tokoh yang bersangkutan mengenai permasalahan ini, seperti astronomi, organisasi-organisasi keIslaman, dan lainnya, kemudian metode itu menjadi sebuah kesepakatan bersama, jadi metode lama tetap dipakai sedangkan metode baru juga digunakan.....”²⁴

Ust Athoillah Wijayanto, S.Ag menambahkan bahwa sebenarnya antara NU dengan rukyahnya dan Muhammadiyah dengan Hisabnya memiliki kesamaan, karena NU juga menggunakan Hisab dalam menentukan awal bulan atau dalam pembentukan sebuah kalender Islam, hal ini terbukti bahwa NU juga memiliki susunan kalender yang dikeluarkan oleh badan otonom NU, sehingga dalam merumuskan kalender memiliki kesamaan metode, akatetapi mungkin kriteria hilalnya saja yang berbeda :

“.....bagaimaa jika permasalahan penentuan kriteria hilalnya kita serahkan kebadan astronomi, sedangkan metode penghitunganya baru kita menggunakan metode masing-masing, saya yakin kalau seandainya kriteria sama walau dengan metode yang berbeda pasti hasilnya pun akan sama, seperti $1+1 = 2$ dan $3-1$ juga sama yaitu 2.....”²⁵

b. Masukan Tokoh muhamadiyah mengenai usaha dari kementrian agama dalam pembentukan sebuah Unifikasi Kalender Hijriyah.

Dr. Abdul Haris. MA menyikapi bahwa perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam masalah kalender hijriyah hanyalah masalah *khilafiyyah*, sehingga perlu beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh

²⁴ Kh.Drs.Chamzawi , Wawancara dengan tokoh NU pada tanggal 14 Maret 2014

²⁵ Ust. Athoillah, Wawancara dengan tokoh NU pada tanggal 24 Maret 2014

pemerintah dalam hal ini adalah kementerian agama Indonesia, karena umat Islam di Indonesia tidak hanya NU dan Muhammadiyah²⁶.

“.....setiap individu kan punya keyakinan, dan keyakinan itu juga tidak ada unsur paksaan dari pihak lain, sehingga memang sangat sulit dalam masalah perbedaan ini, karena kalau saja NU dan Muhammadiyah setuju, bagaimana dengan organisasi Islam yang lain, kan di Indonesia tidak hanya ada NU dan Muhammadiyah.....”

“.....Maka ya.....kita harus kembali kepada fitroh manusia yang mana perbedaan pasti ada, jadi laakum ru'yatukum wa laana hisabunaa.....ya kan”

Berbeda dengan pendapat Dr. Abdul Haris. MA yang terkesan *pesimis* mengenai usaha dari kementerian dalam pembentukan kalender hijriyah terpadu, Drs. Samsul Rizal, MA, sejalan dengan pendapat dari KH.Drs.Chamzawi, M.HI yang beranggapan bahwa kalender Islam memang sangat penting bagi umat Islam, sehingga sangat perlu sebuah kalender Islam yang baku atau yang ter-*unifikasi*, karena metode yang bisa digunakan dalam pembuatan kalender dalam satu tahun adalah metode hisab sedangkan seabsahanya menggunakan metode rukyah:

“.....NU dalam penggunaan rukyah pastilah memiliki landasan dan dasar yang kuat, begitu pula Muhammadiyah dengan metode hisabnya, jadi dalam penyusunan kalender dalam satu tahun bisa menggunakan hisab, karena hisab lebih efisien dan cepat, barulah penggunaan rukyah untuk menentukan benar tidaknya metode hisab yang di tentukan.....”²⁷

Dr. H. Nur Hakim, M.Ag, sependapat dengan Dr. Abdul Haris. MA, tentang pentingnya sebuah kalender Islam untuk umat Islam, sedangkan dari segi pelaksanaanya Dr. H. Nur Hakim, M.Ag menyerahkan kepada pemerintah :

²⁶ Abdul Haris, Wawancara dengan tokoh Muhammadiyah pada tanggal 18 Maret 2014

²⁷ Samsul Rizal, Wawancara dengan tokoh Muhammadiyah pada tanggal 18 Maret 2014

“.....umat Islam ya memang harus menggunakan kalender Islam, dalam menentukan sebuah peribadahan, maka sebaiknya pemerintah terus mengadakan penelitian, seminar, dan pemahaman-pemahaman mengenai permasalahan ini.....apapun yang ditetapkan oleh pemerintah, selagi itu baik untuk umat Islam ya.....kita wajib mengikutinya.....”²⁸

Memperhatikan fenomena tersebut, nampak bahwa Kementerian Agama berinisiatif untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan tersebut. Sedangkan Organisasi Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang sangatlah berharap bahwa umat Islam di Indonesia memiliki kalender yang baku atau unifikasi kalender hijriyah di Indonesia agar cepat terbentuk dan terlaksana.

Pada dasarnya kehadiran kalender Islam terpadu atau unifikasi kalender hijriyah di Indonesia mampu untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyyah khususnya dalam beribadah. Hanya saja dalam dataran realistik praktis dan etika praktis masih sangat sulit.

C. Analisis Data

Dalam menganalisa data, peneliti akan berusaha menyajikan data analisa kedalam bentuk tabel, tabel ini mencakup data yang telah di paparkan, mengenai pendapat para tokoh dan ulama kota Malang mengenai usaha pembentukan kalender hijriyah terpadu/unifikasi kalender hijriyah. Di dalam tabel ini, sekaligus akan menggolongkan responden kedalam dua tipologi ulama kota Malang beserta pendapat serta masukan mengenai usaha pembentukan kalender hijriyah terpadu/unifikasi kalender hijriyah.

KH.Drs.Chamzawi, M.HI, selaku ketua syuriah Nadlatul Ulama kota Malang, sangatlah mendukung terwujudnya kalender Islam yang terpadu, karena

²⁸ Nur Hakim, Wawancara dengan tokoh Muhammadiyah pada tanggal 18 Maret 2014

dengan adanya kalender Islam terpadu dari pemerintah yang diwakili oleh Kementerian agama dapat menyelesaikan perbedaan dalam penentuan tanggal hijriyah di Indonesia, asalkan sesuai dengan kesepakatan karena Keputusan hakim atau pemerintah dalam mengambil sebuah ijtihad dapat menghilangkan persengketaan,

Hal ini sesuai dengan usaha pemerintah dalam Agenda lokakarya terakhir pada tanggal 18 - 19 Juni 2012, di mana Kementerian Agama RI mengadakan sidang Badan Hisab Rukyat sebagai tindak lanjut Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyat yang diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI bertempat di hotel Millenium Jakarta, pada hari Senin - Selasa tanggal 18 - 19 Juni 2012 M / 28 - 29 Rajab 1433 H, yang dihadiri oleh Majelis Ulama, anggota Badan Hisab Rukyat, perwakilan pemerintah (Kementerian Agama), Mahkamah Agung, Planetarium, Perguruan Tinggi dan perwakilan ormas Islam, yang menghasilkan rumusan sebagai berikut :

1. Sepakat memposisikan Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI sebagai *ulil amri* yang memegang otoritas penetapan awal bulan qamariyah dalam takwim (kalender) standar Indonesia.
2. Perlu dilakukan upaya maksimal untuk mewujudkan kriteria penetapan awal bulan qamariyah dalam takwim (kalender) standar Indonesia yang otoritatif secara syar'i maupun ilmiah.
3. Untuk merumuskan kriteria penetapan awal bulan qamariyah dalam takwim (kalender) standar Indonesia, diperlukan langkah-langkah yang terencana dan berkelanjutan dengan target waktu paling lambat 2015, sebagai berikut :

- a. Optimalisasi peran Badan Hisab Rukyat dalam melakukan kajian dan penelitian untuk merumuskan kriteria penetapan awal bulan qamariyah dalam takwim (kalender) standar Indonesia yang otoritatif.
- b. Memfasilitasi komunikasi intensif antar pimpinan ormas Islam dalam menyatukan pandangan tentang posisi Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI sebagai ulil amri yang memegang otoritas penetapan awal bulan qamariyah dalam takwim (kalender) standar Indonesia.
- c. Memfasilitasi pimpinan ormas Islam tingkat pusat untuk membahas kriteria penetapan awal bulan qamariyah dalam takwim (kalender) standar Indonesia yang otoritatif.
- d. Mengadakan Muktamar Nasional takwim standar Indonesia. Keempat, Sebelum terwujudnya kriteria yang baru, digunakan kriteria yang selama ini berlaku

Drs. Abdullah Zainur Rouf, MHI, sejalan dengan pendapat KH.Drs.Chamzawi, M.HI tentang peran pemerintah dalam menetapkan sebuah kalender hijriyah beliau juga menambahkan bahwa usaha pemerintah dalam hal ini adalah kementrian agama sangatlah diperlukan, karena perbedaan penetapan awal bulan atau pembuatan kalender Islam yang terpadu dan ter-*unifikasi* sangat memerlukan keputusan dari pemerintah, dan alangkah sebaiknya pemerintah bisa merangkul semua pihak yang berkaitan tentang pembentukan kalender hijriyah, sehingga ketetapan itu menjadi kesepakatan bersama.

Selain Drs. Abdullah Zainur Rouf, MHI, ketua LBM NU kota Malang Drs. Athoillah Wijayanto, S.Ag beranggapan bahwa keberadaan hilal yang menjadi dasar

dalam menentukan awal bulan, sehingga sebenarnya perbedaan yang terjadi bukan pada metode yang digunakan melainkan pada kriteria hilal yang ditetapkan. Sehingga Drs. Athoillah Wijayanto, S.Ag berpendapat bahwa sebaiknya badan Astronomi turut dilibatkan, karena bila kriteria sama pasti dengan metode yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama.

Bahkan dari tokoh Muhammadiyah kota Malang Dr. Abdul Haris. MA beranggapan bahwa permasalahan perbedaan dalam penetapan awal bulan dan kalender Islam adalah masalah *ijtihad*, sehingga terkadang umat Islam yang belum paham dan terlalu mengerti tentang permasalahan ini menjadi bingung, mengenai metode yang digunakan antara hisab dan rukyah hanya permasalahan teknis. Muhammadiyah mengakui rukyah dalam penetapan awal bulan kamariah dan NU juga seharusnya mampu menerima ketetapan awal bulan berdasarkan metode hisab. Dengan itu unifikasi kalender hijriyah bagi kemaslahatan umat Islam di Indonesia pasti mampu terwujud,

Drs. Samsul Rizal, MA menambahkan bahwa penggunaan metode hisab sudah pernah di gunakan oleh para tabi'in dan ulama salaf, bahkan banyak sekali referensi yang menceritakan pentingnya metode hisab dalam menentukan awal serta akhir dari suatu bulan dalam kalender hijriyah, sehingga permasalahan dalam hal ini hanya sebatas kesalah pahaman saja . Drs. Samsul Rizal, MA menambahkan bahwa dengan adanya kalender hijriyah dapat memperkuat tali persatuan dan persaudaraan bagi umat Islam di Indonesia.

Ust. Nur Hakim, sejalan dengan pendapat dari tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal pembentuka kalender Islam terpadu bagi umat Islam di Indonesia, maka beliau menyerahkan kepada pemerintah dengan syarat harus ada kesepakatan bersama dalam menentukan sebuah teori baru.

